TSAQOFAH
Jurnal Penelitian Guru Indonesia

p-ISSN : 2810-0395
e-ISSN : 2810-0042

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google Scholar, Base, etc

https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i1.4326

ANALISIS KRITIS ISU KESETARAAN AKSES PENDIDIKAN DALAM KOMPETISI NEGARA ASEAN (STUDI KASUS DI INDONESIA, MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM)

Critical Analysis of Educational Access Equality Issues in ASEAN Competition (Case Studies in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam)

Sukari & Azhar Nurachman
Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta
sukarisolo@gmail.com; azharov@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 12, 2024	Nov 27, 2024	Dec 7, 2024	Dec 13, 2024

Abstract

This research analyzes the equality of access to education in three ASEAN countries: Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam. Each country faces different challenges and adopts distinct strategies to achieve equitable access to education for all its citizens. Brunei Darussalam stands out with its comprehensive free education system, well-distributed infrastructure, and strong support for inclusive education and technology. Malaysia has made progress with free education and financial assistance but still struggles with digital divides and infrastructure gaps in remote areas. Indonesia faces the greatest challenges due to its vast geography and regional disparities, despite implementing various programs such as the 12-Year Compulsory Education Program and the Smart Indonesia Card (KIP). Overall, Brunei excels in implementing more equitable education policies, while Malaysia and Indonesia still need improvements in

Tsaqofah journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

infrastructure distribution, access to technology, and support for students with special needs.

Keywords: Equality of Education Access, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Educational Technology

Abstrak: Penelitian ini menganalisis kesetaraan akses pendidikan di tiga negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Setiap negara memiliki tantangan dan strategi berbeda dalam mewujudkan akses pendidikan yang setara bagi seluruh warganya. Brunei Darussalam menonjol dengan sistem pendidikan gratis yang komprehensif, infrastruktur yang merata, serta dukungan penuh untuk pendidikan inklusif dan teknologi. Malaysia telah menunjukkan kemajuan dengan pendidikan gratis dan bantuan finansial, namun masih menghadapi tantangan dalam hal kesenjangan digital dan infrastruktur di wilayah terpencil. Indonesia menghadapi tantangan terbesar karena luasnya geografis dan disparitas wilayah, meskipun berbagai program seperti Wajib Belajar 12 Tahun dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah diterapkan. Secara keseluruhan, Brunei unggul dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang lebih merata, sementara Malaysia dan Indonesia masih memerlukan perbaikan dalam pemerataan infrastruktur, akses teknologi, serta dukungan bagi siswa berkebutuhan khusus.

Kata Kunci: Kesetaraan Akses Pendidikan, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Teknologi Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Di antara peran pendidikan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan membantu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu. Masyarakat yang berpendidikan lebih produktif, inovatif, dan kompetitif. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, yang menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan.

Pendidikan yang merata memungkinkan semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam meraih keberhasilan (Armansyah, Noviarani & Rusyiana, 2024). Ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat, menciptakan kesetaraan yang lebih baik di dalam masyarakat. endidikan yang berkualitas dapat mendorong inovasi dan perkembangan teknologi yang sangat diperlukan untuk kemajuan masyarakat. Masyarakat yang terdidik mampu menciptakan solusi baru untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti masalah lingkungan, infrastruktur, atau pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter, etika, dan moralitas. Pendidikan membantu individu memahami nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan tanggung jawab sosial, yang penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai (Sutarjo, 2023).

Realita yang terjadi terkait isu pendidikan di Indonesia adalah terkait kesetaraan akses pendidikan. Kesetaraan akses pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Ketimpangan geografis antara perkotaan dan pedesaan, serta daerah terpencil, menyebabkan perbedaan fasilitas dan kualitas pendidikan (Maula, Irwandi, Sari, Sarimin, Rondonuwu, 2023). Faktor ekonomi juga mempengaruhi, dengan keluarga miskin kesulitan membiayai pendidikan, meski ada program bantuan seperti BOS dan KIP. Kesadaran akan pentingnya pendidikan, terutama bagi anak perempuan, masih rendah di beberapa daerah. Meski teknologi berpotensi mengatasi ketimpangan, akses digital yang belum merata justru memperlebar kesenjangan. Upaya pemerintah melalui program seperti PIP dan peningkatan kualitas guru belum sepenuhnya merata, terutama di wilayah pedalaman.

Kesetaraan akses pendidikan di kawasan ASEAN merupakan isu yang kompleks karena perbedaan sosial, ekonomi, dan politik di setiap negara anggota. ASEAN, yang terdiri dari 10 negara dengan tingkat pembangunan yang bervariasi, menghadapi tantangan yang berbeda dalam menyediakan akses pendidikan yang setara. Negara-negara yang lebih maju seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki sistem yang lebih merata dibandingkan negara-negara berkembang seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar (Safril, Wardahni, Ponsela & Tsauro, 2016). Tantangan utama meliputi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan anggaran untuk pendidikan, kemiskinan, dan masalah akses bagi kelompok marginal seperti anak-anak pengungsi, migran, dan anak-anak berkebutuhan khusus. Meskipun ada kemajuan, masih dibutuhkan usaha yang signifikan untuk mencapai kesetaraan akses pendidikan di seluruh kawasan ASEAN.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis isu-isu kesetaraan akses pendidikan yang dihadapi di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kebijakan dalam pemerataan akses pendidikan di ketiga negara tersebut. Melalui perbandingan dan analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana praktek kesetaraan akses pendidikan dapat ditingkatkan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif untuk meneliti masalah kesetaraan akses pendidikan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memiliki pemahaman mendalam tentang konteks, kebijakan, dan praktik pendidikan di ketiga negara tersebut. Metodologi penelitian ini melibatkan langkah-langkah berikut: pertama, melakukan pengumpulan data sekunder seperti literatur review yang membantu peneliti dalam memahami konteks dan perkembangan terkini dari topik yang diteliti, serta menganalisis dokumen pemerintah dari negara lain untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kebijakan pendidikan yang diterapkan.

Dua metode analisis konten yang digunakan, yaitu pendekatan deskriptif dan komparatif, untuk menganalisis data yang terkumpul guna menggambarkan situasi pendidikan di tiap negara secara rinci. Lalu, dibuatlah analisis perbandingan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan dalam kebijakan, praktik, dan masalah yang dihadapi. Menurut Silverman (2013), "Analisis konten memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pola dan tema dalam data yang dikumpulkan".

Tiga, laporan dibuat dengan menuliskan dan mempresentasikan Hasil analisis dalam bentuk laporan yang komprehensif, dengan deskripsi konteks pendidikan di setiap negara, perbandingan kebijakan dan praktik, serta rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam mengenai isu kesetaraan akses pendidikan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi dan Ruang Lingkup Kesetaraan Akses Pendidikan

   Kesetaraan akses pendidikan adalah kondisi di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, geografis, gender, atau kondisi fisik, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kesetaraan akses ini berarti bahwa semua orang memiliki hak dan akses yang adil terhadap fasilitas pendidikan, baik dari segi kesempatan mendaftar, mengikuti pembelajaran, hingga menyelesaikan pendidikan di berbagai jenjang (Anwar, 2022). Dengan kesetaraan akses pendidikan, diharapkan setiap individu dapat mengembangkan

potensi mereka secara maksimal, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan merata.

Ruang lingkup kesetaraan akses pendidikan mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi kesempatan semua individu untuk mendapatkan pendidikan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi. Beberapa aspek ruang lingkup tersebut di antaranya adalah aspek geografis. Kesetaraan akses pendidikan harus memastikan bahwa anak-anak di pedesaan dan daerah terpencil memiliki akses yang sama terhadap sekolah berkualitas seperti halnya di perkotaan (Rahman, 2017). Hal ini mencakup infrastruktur fisik seperti bangunan sekolah, akses jalan, dan transportasi. Pendidikan harus tersedia bahkan di wilayah-wilayah yang jauh dan sulit dijangkau, dengan fasilitas, guru, dan sumber daya yang memadai.

Aspek kesetaraan berikutnya adalah aspek sosial dan ekonomi. Kesetaraan akses pendidikan berarti bahwa status ekonomi seseorang tidak boleh menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan. Program beasiswa, bantuan keuangan, dan sekolah gratis dapat membantu mengatasi hambatan ini. Anak-anak dari latar belakang sosial yang berbeda, termasuk mereka dari kelompok marjinal atau terpinggirkan, harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, tanpa dipengaruhi oleh status sosial mereka (Rahmanita, 2024).

Anak laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, tanpa diskriminasi berdasarkan gender. Di beberapa budaya, anak perempuan sering kali menghadapi hambatan untuk melanjutkan pendidikan, dan kesetaraan akses pendidikan harus mengatasi masalah ini (Al Ariqi, 2024). Anak-anak dengan disabilitas atau kebutuhan khusus harus mendapatkan akses yang setara ke pendidikan melalui fasilitas, program, dan layanan yang inklusif. Ini mencakup penyediaan alat bantu, guru yang terlatih dalam pendidikan inklusif, dan lingkungan belajar yang mendukung.

Ruang lingkup kesetaraan akses pendidikan juga mencakup kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung pendidikan bagi semua orang. Ini meliputi peraturan tentang wajib belajar, program subsidi pendidikan, beasiswa, dan kebijakan anti-diskriminasi. Dalam era digital, kesetaraan akses pendidikan mencakup akses yang setara ke teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam pendidikan daring atau berbasis

teknologi. Ketimpangan digital di antara siswa di daerah maju dan tertinggal harus diatasi agar semua siswa dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang sama.

2. Kesetaraan Akses Pendidikan di Indonesia

Pelaksanaan kesetaraan akses pendidikan di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Program Wajib Belajar 12 Tahun dan bantuan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) berperan penting dalam menyediakan pendidikan gratis di sekolah negeri, sementara Program Indonesia Pintar (PIP) mendukung siswa dari keluarga kurang mampu (Noviani, 2023). Tantangan utama terletak pada kesenjangan geografis, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, di mana akses terhadap fasilitas dan guru masih terbatas.

Program pembangunan infrastruktur dan pengiriman guru melalui Guru Garis Depan (GGD) sudah diterapkan, namun implementasinya masih lambat (Kodrat & Or, 2021). Selain itu, kesetaraan gender dalam pendidikan telah membaik, meskipun beberapa daerah masih menghadapi hambatan budaya. Pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus juga masih kurang, terutama di daerah terpencil yang minim sekolah inklusi. Di sisi lain, meski biaya pendidikan formal gratis, keluarga miskin masih kesulitan menghadapi biaya tidak langsung seperti seragam dan transportasi, meski ada bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kesenjangan digital juga menjadi tantangan, terutama dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi, karena akses internet dan perangkat teknologi yang terbatas di banyak daerah (Riatun & Alvin, 2023). Selain itu, kualitas pendidikan di Indonesia masih tidak merata, dengan sekolah di perkotaan memiliki fasilitas dan guru yang lebih baik dibandingkan di pedesaan. Pemerintah berupaya memperbaiki hal ini dengan meningkatkan anggaran pendidikan dan program pelatihan guru, namun distribusinya masih menjadi masalah. Dengan demikian, meskipun sudah banyak kebijakan dan program yang dilaksanakan, kesetaraan akses pendidikan di Indonesia masih memerlukan perhatian khusus dalam hal pemerataan kualitas, infrastruktur, dan dukungan bagi kelompok marjinal.

Selain itu, masalah pendanaan pendidikan di Indonesia juga mempengaruhi pelaksanaan kesetaraan akses. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan sekitar 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, penggunaan dan distribusinya belum merata. Daerah-daerah terpencil masih tertinggal dalam hal fasilitas pendidikan, kualitas guru,

dan materi pembelajaran. Tantangan birokrasi dalam pendistribusian dana pendidikan sering menghambat efektivitas program-program yang telah dijalankan, sehingga sekolah-sekolah di daerah pedesaan sering kekurangan sumber daya.

Pemerintah telah berupaya meningkatkan akses pendidikan melalui berbagai kebijakan, namun keberhasilan di lapangan belum maksimal. Salah satu solusi yang dijalankan adalah peningkatan pelatihan guru dan program sertifikasi guru untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pengajaran, khususnya di daerah-daerah tertinggal. Namun, permasalahan terkait distribusi guru berkualitas ke daerah-daerah ini masih menjadi kendala yang signifikan (Rimadani, Rizki & Sa'adah, 2024).

Untuk mengatasi tantangan yang ada, dukungan dari seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat diperlukan. Penggunaan teknologi juga bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kesenjangan akses, terutama dengan memperluas jaringan internet dan distribusi perangkat teknologi di daerah-daerah terpencil. Selain itu, penting juga untuk terus mengembangkan program pendidikan inklusif yang mendukung anak-anak berkebutuhan khusus serta memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak dari keluarga miskin dan anak perempuan mendapatkan hak pendidikan yang sama. Secara keseluruhan, meskipun kemajuan telah dicapai, kesetaraan akses pendidikan di Indonesia masih membutuhkan upaya yang lebih besar dan konsisten agar setiap anak di seluruh wilayah dapat meraih pendidikan yang berkualitas.

Dengan fenomena kondisi di atas ternyata Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, terutama di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Pada usia 7-12 tahun, APS mendekati 100%, mencerminkan hampir seluruh anak sudah bersekolah di tingkat dasar, berkat program Wajib Belajar 12 Tahun dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, pada jenjang pendidikan menengah pertama (usia 13-15 tahun), APS sedikit menurun, meskipun masih cukup tinggi, yaitu di kisaran 90% (Sudarwati, Sofiah & Kintamani, 2016). Faktor seperti kondisi ekonomi dan jarak ke sekolah menjadi kendala di beberapa daerah.

Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada jenjang pendidikan menengah atas (usia 16-18 tahun), dengan APS yang berkisar antara 60-80%, terutama disebabkan oleh hambatan ekonomi, perlunya bekerja, dan kurangnya akses ke sekolah menengah atas di daerah terpencil. Untuk pendidikan tinggi, APS lebih rendah lagi, yaitu di kisaran 30-

40%, dengan keterbatasan ekonomi dan akses menjadi faktor utama (Indonesia, B.P.S.R., 2017). Meskipun berbagai kebijakan seperti BOS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah membantu meningkatkan partisipasi, tantangan seperti kesenjangan geografis, ekonomi, dan sosial masih perlu diatasi agar semua anak Indonesia dapat memiliki akses pendidikan yang setara di semua jenjang.

3. Kesetaraan Akses Pendidikan di Malaysia

Pelaksanaan kesetaraan akses pendidikan di Malaysia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah. Pendidikan dasar hingga menengah di sekolah-sekolah pemerintah bersifat gratis, dan program bantuan seperti Bantuan Khas Awal Persekolahan serta Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin memberikan dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk meringankan beban biaya tidak langsung (Omar& Noh, 2017).

Dalam hal kesetaraan gender, anak laki-laki dan perempuan memiliki akses yang hampir setara di semua jenjang pendidikan. Namun, tantangan tetap ada, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Sabah dan Sarawak, di mana infrastruktur pendidikan masih tertinggal (Hasan, 2017). Pemerintah telah membangun sekolah-sekolah di wilayah pedesaan, menyediakan transportasi sekolah, serta memberikan insentif bagi guru yang ditempatkan di daerah tersebut. Malaysia juga mengambil langkah penting dalam mengembangkan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus, meskipun masih terdapat kendala dalam penyediaan fasilitas dan pelatihan guru.

Di sisi lain, penggunaan teknologi dalam pendidikan terus didorong melalui inisiatif Smart Schools dan bantuan data internet bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Meski demikian, kesenjangan digital masih menjadi tantangan, terutama di wilayah pedesaan. Pemerintah juga terus mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi melalui berbagai beasiswa dan subsidi pendidikan bagi siswa kurang mampu. Untuk memastikan kualitas pendidikan, pelatihan bagi guru terus ditingkatkan, dan guru yang bekerja di daerah terpencil mendapatkan insentif tambahan.

Meskipun berbagai langkah telah diambil, Malaysia masih perlu menghadapi beberapa tantangan dalam mewujudkan kesetaraan akses pendidikan yang lebih merata. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Sekolah-sekolah di perkotaan umumnya lebih maju dalam hal infrastruktur, fasilitas teknologi, dan akses sumber daya pembelajaran, sementara

sekolah di daerah terpencil masih mengalami kekurangan sumber daya. Meskipun pemerintah telah memberikan insentif bagi guru di daerah terpencil dan membangun sekolah baru, masalah kekurangan tenaga pengajar dan kualitas pengajaran tetap menjadi perhatian.

Selain itu, digitalisasi pendidikan yang semakin penting pasca pandemi COVID-19 menimbulkan kesenjangan digital yang signifikan. Akses internet yang terbatas di daerah-daerah terpencil menghambat pembelajaran daring dan digitalisasi pendidikan secara merata. Siswa dari keluarga kurang mampu juga seringkali tidak memiliki perangkat teknologi yang memadai untuk mengikuti pembelajaran daring, sehingga memperlebar kesenjangan pendidikan antara siswa yang memiliki akses teknologi dan yang tidak.

Pemerintah Malaysia terus berupaya mengatasi kesenjangan ini dengan program subsidi perangkat digital dan peningkatan infrastruktur internet di daerah pedesaan. Namun, dibutuhkan upaya yang lebih menyeluruh untuk memastikan bahwa teknologi dapat diakses oleh semua siswa tanpa terkecuali. Selain itu, fokus juga diberikan pada pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus, meskipun tantangan dalam penyediaan fasilitas dan tenaga pendidik yang terlatih masih menjadi hambatan bagi implementasi yang optimal.

Secara keseluruhan, meskipun kesetaraan akses pendidikan di Malaysia telah mengalami kemajuan, terutama dalam hal akses dasar dan bantuan ekonomi, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal pemerataan kualitas pendidikan dan akses teknologi. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan berkualitas.

4. Kesetaraan Akses Pendidikan di Brunei Darussalam

Sistem pendidikan di Brunei Darussalam sangat fokus pada kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh warganya. Pendidikan gratis diberikan dari tingkat dasar hingga universitas, dengan dukungan beasiswa bagi siswa yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Kurikulum berkualitas dan pelatihan guru yang ketat memastikan pendidikan yang merata di seluruh wilayah. Infrastruktur sekolah di Brunei, termasuk di daerah terpencil, dilengkapi dengan fasilitas modern dan teknologi digital yang mendukung pembelajaran.

Kesetaraan gender juga telah tercapai dengan baik, di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama di semua jenjang pendidikan. Selain itu, Brunei memiliki program pendidikan inklusif yang mendukung anak-anak berkebutuhan khusus, serta pendidikan vokasional yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh keterampilan teknis. Pendidikan tinggi juga mudah diakses melalui universitas negeri dan swasta, didukung dengan program beasiswa dan subsidi pemerintah. Dengan semua kebijakan ini, Brunei telah berhasil menciptakan sistem pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas tinggi bagi semua warganya (Ahmad, 2019).

Brunei terus meningkatkan penggunaan teknologi dalam pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih modern dan efisien. Sekolah-sekolah di seluruh negeri dilengkapi dengan perangkat digital dan akses internet yang memadai, memastikan bahwa setiap siswa, baik di perkotaan maupun pedesaan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berbasis teknologi. Program ini sangat penting terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan era digital (Makmun, Mahamod, Taib & Haron, 2016).

Pemerintah juga memberikan perhatian besar pada pendidikan vokasional dan teknik, yang dirancang untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan praktis dan profesional yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Dengan adanya program ini, siswa yang lebih memilih jalur karier non-akademik tetap memiliki kesempatan yang setara untuk sukses dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Secara keseluruhan, Brunei Darussalam telah berhasil menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berfokus pada kualitas. Dukungan pemerintah yang kuat dalam bentuk pendidikan gratis, beasiswa, infrastruktur modern, dan program inklusif memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka melalui pendidikan, tanpa hambatan ekonomi, gender, atau geografis. Ini menjadikan Brunei salah satu negara di Asia Tenggara yang paling sukses dalam mewujudkan kesetaraan akses pendidikan.

5. Perbandingan dan Analisis Kritis

Ketiga negara ini Indonesia, Malaysia dan Brunei memiliki komitmen kuat dalam menyetarakan akses pendidikan untuk warga negaranya. Namun ketiganya memiliki rintangan dan tantangan yang berbeda-beda sebagaimana yang telah dijabarkan di atas.

Brunei Darussalam menonjol dalam kesetaraan akses pendidikan dengan memberikan pendidikan gratis yang komprehensif dari tingkat dasar hingga universitas, termasuk dukungan beasiswa penuh untuk studi ke luar negeri. Infrastruktur pendidikan di Brunei sangat merata, termasuk penggunaan teknologi digital di seluruh negeri. Malaysia juga menunjukkan kemajuan dalam kesetaraan pendidikan, dengan pendidikan gratis dan bantuan finansial melalui program-program seperti Biasiswa Kecil Persekutuan. Namun, Malaysia masih menghadapi tantangan di wilayah pedesaan, terutama terkait infrastruktur dan akses digital. Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar, terutama karena ukuran geografis dan keberagaman wilayahnya. Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan program Wajib Belajar 12 Tahun dan bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah kesenjangan digital, masih menjadi hambatan utama.

Berbicara terkait pendidikan inklusif, Brunei lebih unggul, dengan dukungan penuh bagi anak berkebutuhan khusus dan kesetaraan gender yang tercapai dengan baik, sementara Malaysia dan Indonesia masih berusaha meningkatkan fasilitas dan pelatihan guru untuk kebutuhan tersebut. Secara keseluruhan, Brunei unggul dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang lebih merata, sementara Malaysia dan Indonesia menunjukkan kemajuan namun masih menghadapi tantangan dalam hal kesetaraan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil dan pedesaan.

Brunei juga memiliki keunggulan dalam hal penyediaan dukungan finansial dan beasiswa. Program-program beasiswa Brunei bersifat menyeluruh, memastikan bahwa siswa tidak terbebani oleh biaya pendidikan tambahan. Ini berbeda dengan Indonesia dan Malaysia, di mana meskipun ada program bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan berbagai beasiswa di Malaysia, dukungan tersebut sering kali tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan pendidikan, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Di Malaysia, pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pembangunan infrastruktur di daerah terpencil seperti Sabah dan Sarawak. Namun, kualitas pendidikan di daerah-daerah ini masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah perkotaan, dan masalah kesenjangan digital tetap menjadi tantangan (Setiawan, 2020). Penggunaan teknologi dalam pendidikan, meski mulai diperkenalkan melalui

program **Smart Schools**, masih belum merata di seluruh negeri. Sementara itu, Indonesia menghadapi kesulitan yang lebih besar terkait akses teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil yang minim infrastruktur internet. Pandemi COVID-19 telah memperlihatkan kesenjangan yang lebih luas, di mana banyak siswa di Indonesia kesulitan mengikuti pembelajaran daring.

Dalam hal kesetaraan gender, ketiga negara telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan akses yang setara bagi anak laki-laki dan perempuan di semua jenjang pendidikan. Namun, untuk pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, Brunei memiliki program yang lebih terstruktur dan dukungan fasilitas yang lebih baik. Indonesia dan Malaysia masih perlu meningkatkan penyediaan fasilitas yang memadai serta pelatihan guru untuk menghadapi kebutuhan siswa dengan disabilitas.

Secara keseluruhan, meskipun ada upaya kuat di ketiga negara untuk mewujudkan kesetaraan akses pendidikan, Brunei menonjol karena berhasil menciptakan sistem yang lebih merata dan inklusif dengan dukungan pemerintah yang menyeluruh. Malaysia dan Indonesia menunjukkan kemajuan, namun keduanya masih menghadapi tantangan signifikan terkait kesenjangan infrastruktur, akses teknologi, dan dukungan bagi siswa berkebutuhan khusus, terutama di daerah terpencil.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, perbandingan kesetaraan akses pendidikan antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menunjukkan bahwa Brunei memiliki keunggulan signifikan dalam hal pemerataan akses pendidikan. Dengan pendidikan gratis yang komprehensif dari tingkat dasar hingga universitas, infrastruktur yang merata, serta dukungan penuh bagi anak berkebutuhan khusus dan penggunaan teknologi yang meluas, Brunei berhasil mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Malaysia berada di posisi menengah dengan kebijakan pendidikan yang cukup baik, namun masih menghadapi tantangan terutama di wilayah pedesaan terkait infrastruktur dan kesenjangan digital.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi dan geografis yang lebih kompleks, menghadapi tantangan terbesar dalam hal pemerataan infrastruktur pendidikan, kesenjangan digital, serta pendidikan inklusif, meskipun telah ada upaya pemerintah melalui program wajib belajar dan bantuan finansial (Iskandar, 2019). Secara keseluruhan, Brunei menjadi

contoh yang lebih sukses dalam mencapai kesetaraan akses pendidikan dibandingkan dengan Malaysia dan Indonesia, yang masih memerlukan perbaikan di berbagai aspek.

Ketiga negara memiliki komitmen terhadap kesetaraan akses pendidikan, ukuran geografis dan kondisi ekonomi masing-masing negara memengaruhi hasil pelaksanaan kebijakan tersebut. Brunei, dengan populasi yang lebih kecil dan sumber daya yang melimpah, lebih mudah memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Malaysia, dengan ekonomi yang relatif stabil, juga menunjukkan kemajuan dalam memperbaiki kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil, tetapi masih membutuhkan lebih banyak investasi untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih besar karena populasi yang lebih besar dan kondisi geografis yang tersebar di ribuan pulau. Meskipun program seperti Wajib Belajar 12 Tahun dan bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) membantu mendorong partisipasi siswa, akses ke pendidikan yang berkualitas masih sangat bervariasi, terutama di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital yang menghambat perkembangan pendidikan berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, Brunei berhasil mencapai kesetaraan akses pendidikan dengan lebih efektif, sementara Malaysia dan Indonesia masih dalam tahap mengatasi berbagai kendala struktural, geografis, dan finansial untuk mencapai tingkat pemerataan yang lebih baik. Implementasi kebijakan yang lebih strategis, peningkatan infrastruktur, serta dukungan yang lebih kuat bagi siswa kurang mampu dan berkebutuhan khusus akan menjadi kunci untuk meningkatkan kesetaraan akses pendidikan di kedua negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

Armansyah, A., Noviarani, D., & Rusyiana, R. (2024). Implementasi Sistem Pendidikan Dalam Mengatasi Ketidaksetaraan: Pengaruh Terhadap Stratifikasi Sosial. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 17235-17243.

Sutarjo, S. (2023). Mengoptimalisasikan Pendidikan Karakter Siswa Sebagai Fondasi Kebangkitan Generasi Emas 2045. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 1(4), 257-262.

Maula, I., Irwandi, I., Sari, A. L., Sarimin, D. S., & Rondonuwu, R. H. (2023). Pendidikan Untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak. *Journal on Education*, 5(4), 13153-13165.

Safril, A., Wardahni, A., Ponsela, D. F., & Tsauro, M. A. (2016). Problem DasarKesenjangan Digital di Asia Tenggara. *Jurnal Global dan Strategis Universitas Airlangga*, 10(2).

Silverman, D. (2013). Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. Sage Publications.

Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perpsektif pendidikan multikultural. Foundasia, 13(1), 1-15.

Rahman, H. (2017). Potret pertumbuhan ekonomi, kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia dalam tinjauan ekonomi politik pembangunan. *Ilmu dan Budaya*, 40(55).

Rahmanita, A. (2024) Pemberdayaan Anak Jalanan Dalam Melanjutkan Pendidikan di Sekolah Master Depok *(Bachelor's thesis*, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Al Ariqi, M. A. (2024). Tantangan United Nations Women Kawasan Asia Dan Pasifik Dalam Menghadapi Diskriminasi Perempuan Di Afghanistan Berdasarkan DUHAM. SAHATA: *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 1(1), 1-11.

Noviani, D. (2023). Animo Masyarakat Terhadap Pendidikan Gratis di SMK Nurul Huda Desa Ulak Kembahang Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 105-116.

Kodrat, H., & Or, S. (2021). Implementasi Merdeka Belajar Di Wilayah 3t Untuk Melahirkan Sdm Unggul Di Tengah Pandemic Covid-19. *Strategi Peningkatan Sdm Unggul Berdaya*, 45.

Riatun, R., & Alvin, S. (2023). EVALUASI PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN JARAK JAUH: STUDI KASUS DI UMN. *Academy of Education Journal*, 14(2), 423-434.

Rimadani, N. W., Rizki, N. K., & Sa'adah, N. (2024). Problematika Profesi Kependidikan dan Solusinya Guna Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar. *In Social, Humanities, and Educational Studies (SHES)*: Conference Series (Vol. 7, No. 3).

Sudarwati, S., Sofiah, S., & Kintamani, I. (2016). ANALISIS kinerja Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Indonesia, B. P. S. R. (2017). Indeks Pembangunan Manusia 2016. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.

Omar, N., & Noh, M. A. C. (2017). Kepelbagaian elemen budaya dalam pengajaran pendidikan islam: isu dan kepentingan. *O-JIE: Online Journal of Islamic Education*, 3, 1-11.

Hasan, S. N. W. (2017). Pengajaran Pendidikan Hak-Hak Wanita Muslim: Pengalaman Institut Pendidikan Guru di Sarawak. *O-JIE: Online Journal of Islamic Education*, 2(1).

Ahmad, S. S. H. (2019). Isu Kosa Kata Bahasa Arab Di Kalangan Pelajar Tahun 9 Sekolah Ugama Arab Menengah Pengiran Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha (Suampripahs), Negara Brunei Darussalam: Cabaran Dan Penyelesaian. JALL| *Journal of Arabic Linguistics and Literature*, 1(1), 46-60.

Makmun, R., Mahamod, Z., Taib, N. I. M., & Haron, A. R. (2016). Pengetahuan Teknologi Pedagogikal Kandungan Kesusasteraan Melayu: Peranan Guru Sastera dalam SPN 21. *Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu*, 1(2), 85-98.

Setiawan, B. (2020). Integrasi dan Nasionalisme di Natuna. *Jurnal Masyarakat dan Budaya.*

Iskandar, W. (2019). Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 4(*1), 1-22.